



## Pranatan Anyar



KR-Surya Adi Lesmana

**KALIURANG MASA PANDEMI:** Wisatawan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan memberi makanan monyet di kawasan parkir Tlogo Putri, Kaliurang, Sleman, Jumat (5/3). Kawanan satwa liar monyet menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang di masa pandemi Covid-19.

### WAKSINASI GOTONG ROYONG

## Tak Ganggu Program Pemerintah

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Kesehatan menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan mengganggu Program Vaksinasi Nasional Covid-19 Pemerintah.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers kebijakan vaksinasi Gotong Royong secara virtual di Jakarta, Jumat (5/3). Untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok, Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 24 Februari 2021.

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN. "Vaksinasi Gotong Royong ini tentunya tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh Pemerintah," kata Nadia.

Menurut Nadia, layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik Pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di Fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai Pos Pelayanan Vaksinasi.

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat," tuturnya.

Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. (Ari)-d

### PPKM MIKRO AKAN DIPERPANJANG

## Tetap Hati-hati, Jangan 'Sembrana'

**TEMANGGUNG (KR)** - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Tengah akan diperpanjang untuk 14 hari ke depan, kendati telah ada perkembangan menggembirakan dengan menurunnya pertambahan jumlah pasien Covid-19.

"PPKM Mikro di Jateng selesai 8 Maret, rencananya diperpanjang lagi. Sejahter ini perkembangannya cukup bagus," kata Ganjar Pranowo di sela peresmian Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung, Jumat (5/3).

Gubernur Jateng mengatakan, zona Covid-19 di Jateng untuk kabupaten telah mencapai warna oranye, sedangkan perkecamatan catatan terakhir ada empat kecamatan yang masih zona merah. Namun dilihat perdesa telah menguning dan hijau. Yang pasti, warga diminta untuk

tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes), tidak boleh *sembrana* dan tetap hati-hati. "Warga yang terjadwal vaksinasi untuk segera disuntik," katanya.

Dikemukakan, pihaknya juga telah mengirim sampel tes usap ke Laboratorium Litbangkes Kemenkes, dari sekitar 20 warga yang sempat berinteraksi dengan seorang TKI yang baru saja pulang. Tracing pertama beberapa hari lalu terhadap 8 orang dan selanjutnya pada Jumat 12 orang. "Kami tidak mau ambil risiko, kami lakukan pengetesan dan

penelusuran pada yang kontak untuk dilakukan tes usap," katanya.

Menurut Ganjar, sebenarnya warga tersebut sudah melakukan tahapan sesuai prosedur yakni menjalani isolasi atau karantina lima hari begitu masuk Tanah Air. Karena tidak ditemukan gejala lalu diperbolehkan pulang ke kampung halamannya.

"Sebenarnya dia dari Jakarta itu sudah negatif namun kita tidak mau ambil risiko, siapa yang ketemu kita tes, semoga dalam beberapa hari ini sudah keluar hasilnya," kata Gubernur.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi mengatakan, zonasi Covid-19 di Kabupaten Magelang masih oranye. Dari 12 indikator, skornya masih tetap 2,14 seperti sebulan sebelumnya, hanya saja trennya sudah menuju zona kuning. (Osy/Bag)-d

### MULAI 15 MARET 2021

## ASN DIY Ikuti Vaksinasi Massal

**YOGYA (KR)** - Vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mengingat pentingnya Program Vaksinasi Covid-19, Pemda DIY kembali mengadakan vaksinasi massal bagi petugas pelayanan publik. Vaksinasi massal kedua tersebut akan menyasar para pelayan publik termasuk aparat sipil negara (ASN) di DIY, yang rencananya diadakan di Jogja Expo Center (JEC) mulai 15 Maret 2021 mendatang.

"Kami mendukung penuh dan siap sukseskan Program Vaksinasi Covid-19. Dalam kegiatan vaksinasi massal kali ini, Gugus

Tugas menyediakan sekitar 10.000 dosis vaksin. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama lima hari. Artinya, dalam sehari rata-rata ada 2.000 orang yang akan menerima injeksi vaksin Covid-19. Mudah-mudahan semua tahapan lancar dan bisa memutus mata rantai penularan Covid-19," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (5/3).

Mengenai sasaran vaksinasi massal di kawasan Malioboro (Taman Parkir ABA, Museum Benteng Vredenburg dan Pasar Beringharjo) yang belum optimal, Baskara Aji mengatakan, hal itu terjadi karena ada

calon penerima vaksin yang tidak memenuhi undangan, tidak hadir, serta kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk divaksin. Kepada mereka yang berhalangan atau belum bisa divaksin karena faktor kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mengikuti vaksinasi secara reguler.

"Kalau sudah lima hari kita jadwalkan belum datang, dia kan bisa mengikuti vaksinasi reguler atau nanti kalau ada vaksinasi massal bisa ikut. Karena mereka sudah dijadwalkan. Sementara bagi yang belum akan diundang di kesempatan lain," ungkapnya. (Ria/Ira)-d

## Petakan Pendidikan, DIY Akan Gelar ASPD

**YOGYA (KR)** - DIY merasa perlu mengetahui kondisi mutu pendidikan saat ini, khususnya setelah dilanda Pandemi Covid-19. Untuk mengetahuinya, akan digelar Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) untuk jenjang SMP dan SD. Sehingga akan diketahui peta terkait mutu pendidikan saat ini dan bagaimana penanganannya ke depan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya SE MM kepada KR, Jumat (5/3) mengemukakan, ASPD ini tidak digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Selain dengan tujuan pemetaan pendidikan, khususnya siswa yang akan menyelesaikan studinya, hasil dari ASPD ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam seleksi masuk untuk sekolah di jenjang berikutnya.

Menurut Didik, munculnya rencana dilaksanakan ASPD ini, hasil diskusi panjang antara Disdikpora DIY dengan dinas pendidikan kabupaten/kota se-DIY. Dari diskusi ini, muncul upaya mencoba melakukan

standarisasi pendidikan.

Sedangkan pelaksanaan, kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk jenjang SMP, pelaksanaan dilakukan oleh dinas kabupaten/kota. Sedangkan Disdikpora DIY berperan melakukan koordinasi. Sedangkan untuk jenjang SD, peran pihak, menyiapkan SOP dalam pembuatan soal nantinya.

Hasil pemetaan pendidikan yang terstandar, akan sangat bermanfaat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nilai yang dihasilkan, dapat menjadi pertimbangan dalam proses seleksi PPDB.

Dalam ketentuan PPDB, selain pengaturan zona sekolah, juga digu-

nakannya rapot sebagai alat seleksi. Namun disadari, penilaian antara guru dan sekolah terhadap masing-masing siswa berbeda-beda, tidak terstandarisasi.

"Sehingga perlu alat tambahan, salah satunya dari hasil ASPD nantinya, sebagai pembanding. Berapa persentase nilai yang dihasilkan dari ASPD dalam penentuan jenjang berikutnya, masih dibahas," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan, menurut Didik, kabupaten kota sudah merancang dalam penerapan protokol kesehatan. Pihaknya sendiri terus mencari formula yang terbaik untuk pelaksanaannya.

"Apakah menggunakan online murni, atau semi online. Untuk SMP, akan dilaksanakan UNBK seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan waktu yang tidak lama, diharapkan bisa berjalan baik," ujarnya. (Jon)-f



KR-Zaini Atrosyid

**Mensos Tri Rismaharini (tengah) melihat hasil kerajinan di Sentra Kreasi Atensi Balai Besar Disabilitas Kartini, Temanggung.**

### BANTU PENYANDANG DISABILITAS

## Kemensos Rencanakan Wujudkan 41 SKA

**TEMANGGUNG (KR)** - Kementerian Sosial (Kemensos) berencana mewujudkan 41 Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Indonesia sebagai multi pelayanan pada kelompok rentan dan termajinalkan. SKA akan dijadikan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional, selain menjadi media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan.

Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat meresmikan SKA di Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung, Jumat (5/3). Dalam peresmian itu, ikut mendampingi antara lain Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Temanggung Al Khadziq dan Kepala Balai Joewina.

Tri Rismaharini mengatakan, saat ini SKA antara lain telah berdiri di Balai Pangudi Luhur Bekasi

dan Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung. Pembentukan ini memang tidak dapat ditunda-tunda, karena sangat dibutuhkan penyandang disabilitas.

"SKA sangat dibutuhkan dan saudara-saudara kita bisa segera memanfaatkan. Kecepatan kepala balai sangat menentukan perwujudan SKA ini," kata Tri Rismaharini.

Dia mengatakan di SKA itu penerima manfaat tidak hanya satu jenis disabilitas, tetapi berbagai macam. Contohnya, tidak hanya disabilitas netra, tetapi juga runtu dan lansia. Mereka diajari berbagai keterampilan seperti batik ciprat, handycraf, laundry, cafe, bertani dan beternak.

Dia mengatakan sejumlah balai dipaksa untuk memproduksi memenuhi kebutuhan kaum disabilitas. Misalnya, Balai Besar Disabilitas Fisik Prof

Suharso di Solo untuk membuat 300 kursi roda elektrik, yang diperuntukkan 100 buah disabilitas pengguna kursi roda, 100 serebral palsu dan 100 untuk hydrocypalus. "Di Makasar juga demikian. Untuk buat 100 untuk kursi roda elektrik," kata dia.

Balai Besar di Cibinog, katanya akan membuat sepeda motor roda tiga dengan harapan penyandang disabilitas punya aksesibilitas lebih baik karena menggunakan kendaraan yang bisa digunakan untuk bekerja. "Tuhan memang membawa kita cobaan berupa pandemi, tetapi kita dikaruniai akal dan kesehatan, sehingga bisa melakukan berbagai hal," kata dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, melalui SKA diharapkan penyandang disabilitas berkarya dengan hasil yang berkualitas. (Osy)-d

### TERLIBAT PENJUALAN ANAK

## Polisi Tangkap Ibu Rumah Tangga

**PEMALANG (KR)** - Ketahuan menjajakan anak di bawah umur, seorang ibu rumah tangga (IRT) dari Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, Ma (29) diamankan petugas polisi setempat. Hingga Jumat (5/3) petang pelaku masih diperiksa petugas.

Tersangka tertangkap basah diduga melakukan bisnis syahwat prostitusi online, dengan menjajakan anak di bawah umur melalui telepon seluler. Saat diperiksa, tersangka mengaku menjual anak gadis yang masih di bawah umur, untuk melayani laki-laki hidung belang. Tersangka ditangkap petugas di sebuah wisma di Moga Pemalang.

Kapolsek Moga Iptu Wahyudi Wibowo membenarkan penangkapan itu. Menurutnya, tersangka selama ini mencari pelanggan pria hidung belang dengan berkomunikasi lewat ponselnya. Tersangka mematok tarif Rp 500 ribu untuk sekali transaksi. Sementara korban hanya dikasih Rp 150 ribu, bayar kamar Rp 150 ribu dan untuk tersangka sendiri Rp 200 ribu. "Jadi tersangka mengakui hanya dapat Rp 200 ribu," ujar Wahyudi.

Penangkapan tersangka bermula dari pengaduan masyarakat. Setelah dilakukan pendalaman dan mendapat informasi, Polsek bersama Unit Resmob Polres Pemalang lalu menangkap tersangka, Kamis (4/3) malam. Korban yang berhasil diamankan satu orang, masih anak-anak, kasus ini masih dikembangkan apakah masih ada pelaku lain atau korban. (Ryd)-d

### REKOR SEPANJANG SEJARAH

## Pemda Usul 568.238 Formasi Guru

**JAKARTA (KR)** - Pemerintah daerah (Pemda) telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pembukaan formasi sampai dengan satu juta guru. Meski data usulan formasi masih terus dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), jumlah ini adalah rekor penerimaan formasi guru untuk mengikuti seleksi ASN PPPK terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syahril, mengatakan, Pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori 2 (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG). "Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi," kata Dirjen GTK Iwan Syahril di Jakarta, Jumat (5/3).

Iwan menjelaskan, pencapaian tersebut diperoleh setelah Kempan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sosialisasi dilakukan Kemendikbud dalam berbagai bentuk, mulai dari lokakarya yang dibagi berdasarkan region sesuai dengan kedudukan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur kepada seluruh pemda yang teriri dari unsur dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Oktober hingga Desember 2020.

Kemendikbud juga terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk tatap muka, maupun daring selama Januari hingga Maret 2021. (Ari)-d